





# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA BEKASI MENURUT PENGELUARAN

## 2013-2017



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BEKASI**

# **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA BEKASI MENURUT PENGELUARAN 2013 - 2017**

**Nomor Publikasi** : 32750.1802  
**Katalog** : 9302020.3275

**Ukuran Buku**: 17,6 x 25 cm  
**Jumlah Halaman**: vii + 52 halaman

**Naskah**:  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

**Penyunting**:  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

**Desain**:  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

**Diterbitkan oleh**:  
© Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

**Dicetak oleh**:  
Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**Tim Penyusun**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KOTA BEKASI  
MENURUT PENGELUARAN 2013 - 2017**

Penanggung Jawab Umum :  
Drs. Annazri

Penanggung Jawab Teknis :  
Ika Widyastuti, S.ST

Editor:  
Ika Widyastuti, S.ST

Penulis dan Pengolahan Data :  
Ika Widyastuti, S.ST  
Maya Hayuningtyas, SE  
Dian Eka Putri, S.ST

Desain:  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik  
BPS Kota Bekasi

## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun Kota Bekasi). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*) dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

**Bekasi, Agustus 2018**

**Kepala Badan Pusat Statistik  
Kota Bekasi,**

**Drs. Annazri**

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	1
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	5
BAB II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA .....	11
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) .....	11
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT) .....	13
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P) .....	16
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	18
2.5 Perubahan Inventori (PI) .....	21
2.6 Ekspor Impor .....	25
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA BEKASI MENURUT PDRB	
PENGELUARAN TAHUN 2013-2017 .....	27
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran .....	27
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran .....	34
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah tangga .....	35
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT .....	39
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah .....	40
3.2.4 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	43
BAB IV PENUTUP .....	45
LAMPIRAN .....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013-2017	28
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013-2017	29
Tabel 3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013—2017	31
Tabel 4.	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013—2017	32
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013 – 2017	34
Tabel 6.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Bekasi 2013—2017	36
Tabel 7.	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Bekasi 2013—2017	37
Tabel 8.	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Bekasi 2013—2017	38
Tabel 9.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Bekasi 2013—2017	39
Tabel 10.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kota Bekasi 2013—2017	40
Tabel 11.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Bekasi 2013 – 2017	41
Tabel 12.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Bekasi 2013—2017	44

## DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013-2017	47
Tabel 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013-2017	48
Tabel 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013—2017	49
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013—2017	50
Tabel 5.	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013 – 2017	51
Tabel 6.	Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013—2017	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)<sup>1</sup>. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep<sup>2</sup> penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

---

<sup>2</sup> *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlakukan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat<sup>3</sup>, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

---

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik  
- Disebut sebagai pendekatan “riil”  
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai **“output akhir (*final output*)”**. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y ( <i>Income</i> )	= PDRB Produksi
C ( <i>Consumption</i> )	= Konsumsi akhir
GFCF ( <i>Gross Fixed Capital Formation</i> ) Tetap Bruto	= Pembentukan Modal
$\Delta$ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta  $\Delta$  Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

## 1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

### Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia

untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kota Bekasi menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

### **Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?**

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

### **Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?**

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

### **Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?**

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

### **Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?**

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun<sup>4</sup>;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);

---

<sup>4</sup> SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

### **Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010**

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
  - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
  - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan

tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
  - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi
- Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial Intermediation Services Indirectly Measured/ FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

**Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010**

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

## **BAB II**

# **METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA**

### **2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)**

#### **i. Pendahuluan**

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

#### **ii. Konsep dan Definisi**

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

#### **iii. Cakupan**

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

#### **iv. Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS

- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

#### v. **Metoda Estimasi**

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas (untuk PK-RT Tahunan);
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan);
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota Bekasi;
7. Nilai PK-RT atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

## **2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)**

### **i Pendahuluan**

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi

artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

## **ii Konsep dan definisi**

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

## **iii. Cakupan**

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan

- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

**iv. Sumber Data**

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPTR), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

**v. Metoda Estimasi**

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota Bekasi;
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

## 2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

### ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

### **iii. Cakupan**

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah Kota Bekasi mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- PK-P Kota Bekasi mencakup:
- a). PK-P yang ada di wilayah Kota Bekasi;
  - b). PK-P Provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian dari PK-P Kota Bekasi;
  - c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P Kota Bekasi.

### **iv. Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kota Bekasi tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS

## v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P Kota Bekasi Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output BI}$$

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Kota Bekasi
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Kota Bekasi
Output BI		Neraca Jasa

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

## 2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

### i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam

bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

## ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

## iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual

(*intellectual property products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

#### iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

#### v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply :

PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi :

PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

## 2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

### i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi

menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

## ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan

inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

### iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

### iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa

- Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
  3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
  4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
  5. Data komoditas perkebunan;
  6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
  7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
  8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjenak Kementan.

#### v **Metoda Estimasi**

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

##### a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume nventori (t) - Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

##### b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga berlaku/ IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

## 2.6 EKSPOR - IMPOR

### i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

### ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

### iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah Kota Bekasi terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar Kota Bekasi
- b. Impor dari luar Kota Bekasi.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

#### iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah Kota Bekasi didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor Kota Bekasi diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.

# **BAB III**

## **TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA BEKASI MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2013-2017**

### **3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN**

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2100 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku di tahun 2017 meningkat sebesar 8,35 persen, yakni dari Rp. 76,91 Triliun menjadi Rp. 83,33 Triliun. Jika dinilai atas dasar harga konstan 2010, maka peningkatan ini sebesar 5,73 persen, yakni dari Rp. 58,83 Triliun menjadi Rp. 62,20 Triliun.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Bekasi periode 2013 - 2017 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, yakni berturut-turut sebesar 6,04 persen, 5,61 persen, 5,56 persen, 6,09 persen dan 5,73 persen. Peningkatan tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori informasi dan Komunikasi yang selalu tumbuh di atas 10 persen setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2013 yang tumbuh sebesar 8,98 persen. Dari sisi permintaan akhir,

pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi didominasi pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang mampu tumbuh mencapai 6,70 persen.

Pada periode tahun 2013 - 2017 PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar Rp. 41,28 Triliun (2010); Rp. 57,72 Triliun (2013); Rp. 64,11 Triliun (2014); Rp. 70,77 Triliun (2015); Rp. 76,91 Triliun (2016); dan Rp. 83,33 Triliun pada tahun 2017. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Bekasi pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013 - 2017**

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	68.957,92	75.473,09	83.053,15	89.090,94	95.993,28
2. Konsumsi LNPR	205,38	230,24	222,50	235,05	254,62
3. Konsumsi Pemerintah	2.760,47	3.082,73	3.588,75	3.852,68	4.063,40
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	18.095,72	21.370,97	24.043,14	26.179,28	28.634,02
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor - Impor	-	-	-	-	-
<b>PDRB</b>	<b>57.715,00</b>	<b>64.109,36</b>	<b>70.765,23</b>	<b>76.908,85</b>	<b>83.327,64</b>

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kota Bekasi pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013 - 2017**

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	60.212,08	62.040,16	64.780,72	68.299,96	71.499,95
2. Konsumsi LNPR	179,23	192,06	176,48	181,95	190,48
3. Konsumsi Pemerintah	2.166,93	2.256,11	2.366,34	2.448,19	2.525,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15.320,29	16.914,64	18.047,03	19.223,78	20.511,33
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor - Impor	-	-	-	-	-
<b>PDRB</b>	<b>49.741,13</b>	<b>52.534,09</b>	<b>55.456,07</b>	<b>58.831,08</b>	<b>62.202,01</b>

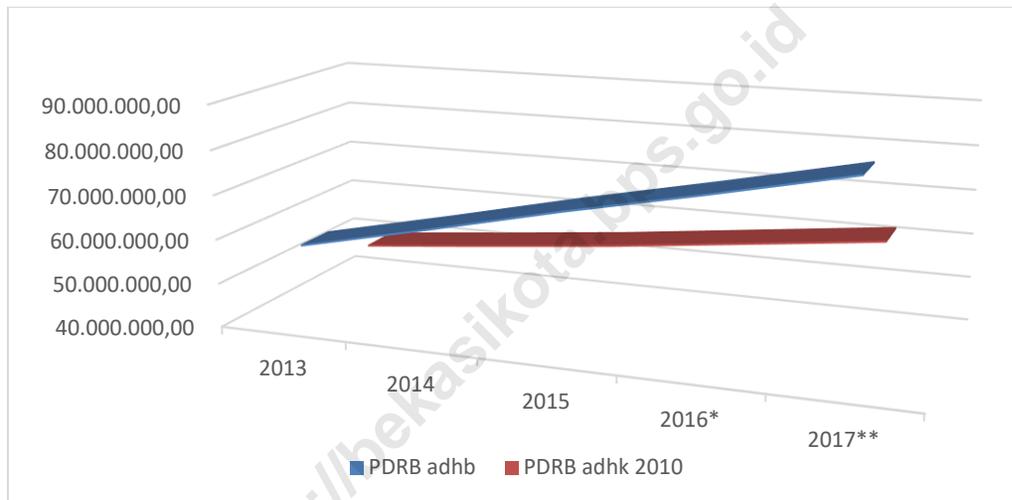
\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kota Bekasi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni sebesar Rp. 49,74 Triliun (2013); Rp. 52,53 Triliun (2014); Rp. 55,46 Triliun (2015); Rp. 58,83 Triliun (2016); dan Rp. 62,20 Triliun Rupiah (2017). Sedangkan dari Grafik 1, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi

dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diiadakan.

**Grafik 1. Perbandingan PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013 -2017 (Juta Rupiah)**



\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2013-2017 penyebaran distribusi terbesar PRDB atas dasar harga berlaku berdasarkan komponen pengeluaran di Kota Bekasi adalah konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2013

tercatat PDRB yang dihasilkan di Kota Bekasi digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 119,48 persen. Besaran ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 2017 persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 115,20 persen.

**Tabel 3. Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013 - 2017**

(Persen)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	119,48	117,73	117,36	115,84	115,20
2. Konsumsi LNPRT	0,36	0,36	0,31	0,31	0,31
3. Konsumsi Pemerintah	4,78	4,81	5,07	5,01	4,88
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,35	33,34	33,98	34,04	34,36
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor-Import	-	-	-	-	-
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Gambaran PDRB Kota Bekasi menurut pengeluaran pada Tabel 3 menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya yang dihasilkan di Kota Bekasi masih belum mampu untuk memenuhi konsumsi rumah tangga ditambah lagi untuk konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Selain konsumsi rumah tangga, pengeluaran dalam bentuk PMTB juga mempunyai peranan yang cukup besar, Selama periode 2013-2017 besaran pengeluaran untuk komponen PMTB selalu bertambah besar, mulai dari 31,35 persen pada tahun 2013 hingga mencapai 34,36 persen pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (import).

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 4, selama periode tahun 2013 - 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi mengalami perlambatan, yakni sebesar 6,04 persen (2013); 5,61 persen (2014); 5,56 persen (2015); 6,09 persen (2016) dan 5,73 persen (2017).

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013 - 2017**

(Persen)					
Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,38	3,04	4,42	5,43	4,69
2. Konsumsi LNPRT	5,59	7,16	-8,11	3,10	4,69
3. Konsumsi Pemerintah	0,97	4,12	4,89	3,46	3,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,66	10,41	6,69	6,52	6,70
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor - Impor	-	-	-	-	-
<b>PDRB</b>	<b>6,04</b>	<b>5,61</b>	<b>5,56</b>	<b>6,09</b>	<b>5,73</b>

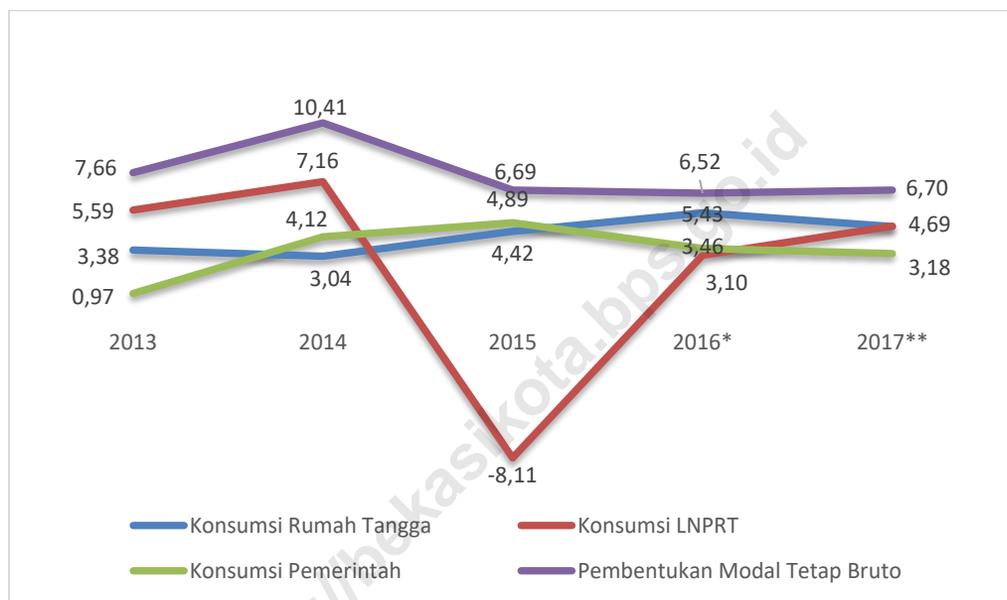
\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Grafik 2 menunjukkan pertumbuhan masing-masing komponen PDRB Menurut Pengeluaran selama periode 2013-2017. Pertumbuhan yang cukup berfluktuatif terlihat pada konsumsi LNPRT. Selama periode tersebut konsumsi LNPRT sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga mencapai 8,11 persen. Sementara itu, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah cenderung mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,43

persen, sedangkan pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 4,89 persen.

**Grafik 2. Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013 - 2017 (Persen)**



\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Laju indeks implisit<sup>5</sup> PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor dan impor. Dari Tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2013 - 2017, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

<sup>5</sup> Indeks perkembangan

**Tabel 5. Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013 - 2017**

(Persen)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,69	6,22	5,39	1,74	2,93
2. Konsumsi LNPRT	8,88	4,62	5,17	2,47	3,47
3. Konsumsi Pemerintah	7,26	10,99	3,76	2,22	7,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,97	5,44	2,22	2,51	6,97
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor - Impor	-	-	-	-	-
<b>PDRB</b>	<b>5,17</b>	<b>4,57</b>	<b>2,45</b>	<b>2,47</b>	<b>5,17</b>

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

### 3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Bekasi untuk periode 2013 - 2017.

### 3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Bekasi ternyata masih belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Bekasi maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013 - 2017 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2013 - 2017 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB selalu melebihi 100 persen. Pada tahun 2013

proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 119,48 persen, mengalami penurunan menjadi 117,73 persen di tahun 2014. Selanjutnya 117,36 persen (2015); 115,84 persen (2016) dan 115,20 persen (2017).

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

**Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bekasi, 2013 – 2017**

<b>Uraian</b>	2013	2014	2015	2016*	2017**
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Milliar Rp)	68.957,92	75.473,09	83.053,15	89.090,94	95.993,28
b. ADHK 2010 (Milliar Rp)	60.212,08	62.040,16	64.780,72	68.299,96	71.499,95
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	119,48	117,73	117,36	115,84	115,20
Rata-rata per Kapita					
a. ADHB (Ribu Rp)	26.831,88	28.555,88	30.592,73	31.964,32	33.568,78
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	23.428,83	23.473,38	23.862,06	24.504,87	25.003,48
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	3,38	3,04	4,42	5,43	4,69
b. Perkapita	0,53	0,19	1,66	2,69	2,03
Jumlah penduduk (000 orang)	2.570	2.643	2.715	2.787	2.860

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 6, tercermin bahwa dalam kurun waktu 2013-2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal (adhb) maupun riil (adhk 2010) sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Secara rata-rata, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adhk 2010 dari tahun

ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan sebesar 3,38 persen. Selanjutnya meningkat sebesar 3,04 persen pada tahun 2014. Hingga pada tahun 2017 konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan mencapai 4,69 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 0,19 persen sampai 2,69 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga Kota Bekasi 2013 - 2017**

Kelompok Konsumsi	(Persen)					
	2013	2014	2015	2016*	2017**	
	-1	-2	-3	-4	-5	-6
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	22,86	24,38	24,62	25,66	25,86	
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,60	3,46	3,48	3,52	3,55	
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,13	12,94	12,82	12,86	12,82	
d. Kesehatan & Pendidikan	3,83	3,74	3,67	3,65	3,66	
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	35,49	35,39	35,57	34,52	34,24	
f. Hotel & Restoran	16,78	15,92	15,60	15,60	15,65	
g. Lainnya	4,32	4,17	4,24	4,18	4,22	
<b>Total Konsumsi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Pola proporsi konsumsi pada Tabel 7 menunjukkan pergeseran yang relatif kecil antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan. Walaupun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat.

**Tabel 8. Pertumbuhan Riil Komponen Konsumsi Rumahtangga Kota Bekasi 2013 - 2017**

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
-1	-2	-3	-4	-5	-6
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,63	5,88	4,81	4,52	4,99
b. Pakaian dan Alas Kaki	8,97	3,17	6,75	5,39	4,79
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,61	2,92	5,08	6,92	3,79
d. Kesehatan & Pendidikan	6,26	3,30	3,69	4,65	4,35
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,54	2,94	3,67	5,93	4,42
f. Hotel & Restoran	2,56	(0,01)	3,91	4,98	5,29
g. Lainnya	1,45	2,89	7,42	3,93	5,89
<b>Total Konsumsi</b>	<b>3,38</b>	<b>3,04</b>	<b>4,42</b>	<b>5,43</b>	<b>4,69</b>

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pertumbuhannya riil nya, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kelompok makanan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 pertumbuhan kelompok konsumsi makanan sebesar 2,63 persen dan pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan sebesar 4,99 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2017 terjadi pada kelompok konsumsi Hotel dan Restoran serta konsumsi Lainnya yang peningkatannya di atas 5 persen.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9 menunjukkan peningkatan untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga secara umum pada kelompok konsumsi rumah tangga yang relatif tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,22 persen. Kontribusi terbesar pada kenaikan harga tersebut disumbangkan oleh kelompok konsumsi makanan, minuman dan rokok dengan pertumbuhan indeks implisit sebesar 10,27 persen. Sedangkan kenaikan harga terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 1,74 persen.

**Tabel 9. Pertumbuhan Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Bekasi 2013 - 2017**

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
-1	-2	-3	-4	-5	-6
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9,50	10,27	6,01	6,97	3,41
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,99	2,06	3,66	3,04	3,56
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,40	4,78	3,73	0,66	3,53
d. Kesehatan & Pendidikan	4,88	3,48	4,17	1,98	3,51
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,50	6,01	6,71	(1,73)	2,34
f. Hotel & Restoran	1,01	3,90	3,77	2,17	2,66
g. Lainnya	5,39	2,65	4,18	1,88	2,63
<b>Total Konsumsi</b>	<b>5,69</b>	<b>6,22</b>	<b>5,39</b>	<b>1,74</b>	<b>2,93</b>

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

### 3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam

kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Bekasi 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Milliar Rp)	205,38	230,24	222,50	235,05	254,62
b. ADHK 2010 (Milliar Rp)	179,23	192,06	176,48	181,95	190,48
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,36	0,36	0,31	0,31	0,31
Pertumbuhan (% ADHK)	5,59	7,16	(8,11)	3,10	4,69

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Peranan konsumsi LNPRT dalam PDRB Menurut Pengeluaran di Kota Bekasi sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Pada tahun 2013 konsumsi LNPRT sebesar Rp. 205,38 Milliar, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu Rp. 230,24 Milliar (2014), Rp. 222,50 Milliar (2015), Rp. 235,05 Milliar (2016) dan Rp. 254,62 Milliar (2017). Pertumbuhan tertinggi pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 terjadi pada tahun 2014 karena bertepatan dengan adanya pemilihan kepala daerah.

### 3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan

kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Bekasi 2013 - 2017**

<b>Uraian</b>	2013	2014	2015	2016*	2017**
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Milliar Rp)	2.760,47	3.082,73	3.588,75	3.852,68	4.063,40
b. ADHK 2010 (Milliar Rp)	2.166,93	2.256,11	2.366,34	2.448,19	2.525,99
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	4,78	4,81	5,07	5,01	4,88
Rata-rata per Kapita					
a. ADHB (Ribu Rp)	1.073,95	1.166,60	1.321,92	1.382,28	1.420,97
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	843,03	853,78	871,64	878,37	883,34
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi Pemerintah	0,97	4,12	4,89	3,46	3,18
b. Perkapita	(1,82)	1,24	2,09	0,77	0,57
Jumlah penduduk (000 orang)	2.570	2.643	2.715	2.787	2.860

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adhb sebesar Rp. 2,76 Triliun, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar Rp. 3,08 Triliun (2014), Rp. 3,59 Triliun (2015), Rp. 3,85 Triliun (2016) dan Rp. 4,06 Triliun (2017). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan hampir setiap tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDB juga mengalami fluktuasi, dari 4,78 persen pada tahun 2013 hingga mencapai 4,88 persen di tahun 2017. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2013, sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 5,07 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 1,07 juta, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu hingga mencapai Rp. 1,42 juta pada tahun 2017.

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara riil menunjukkan seberapa besar pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,89 persen dan konsumsi pemerintah per kapita sebesar 2,09 persen.

#### **3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)<sup>6</sup>. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data pada Tabel 12 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 - 2017 berfluktuasi dari 7,66 persen (2013) menjadi 6,70 persen (2017). Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai besaran hingga 10,41 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,52 persen. Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam PMTB. Sedangkan proporsi non bangunan selama tahun 2013-2017 berada pada kisaran 12-14 persen.

---

<sup>6</sup> Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Bekasi  
2013 - 2017**

<b>Uraian</b>	2013	2014	2015	2016*	2017**
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Total PMTB					
a. ADHB (Milliar Rp)	18.095,72	21.370,97	24.043,14	26.179,28	28.634,02
b. ADHK 2010 (Milliar Rp)	15.320,29	16.914,64	18.047,03	19.223,78	20.511,33
Proporsi terhadap PDRB ( % ADHB)	31,35	33,34	33,98	34,04	34,36
Struktur PMTB					
a. Bangunan (Milliar Rp)	15.821,06	18.313,73	20.639,54	22.369,92	24.599,61
(%)	87,43	85,69	85,84	85,45	85,91
b. Non Bangunan (Milliar Rp)	2.274,67	3.057,24	3.403,60	3.809,37	4.034,41
(%)	12,57	14,31	14,16	14,55	14,09
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	17,45	8,69	7,31	6,92	7,23
b. Non Bangunan	(31,25)	22,03	3,01	4,04	3,25
Total PMTB	7,66	10,41	6,69	6,52	6,70

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013-2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Bekasi pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013-2017, sehingga mudah menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output.

<https://bekasikota.bps.go.id>

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi  
2013 -2017**

*(Milliar Rupiah)*

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	68.957,92	75.473,09	83.053,15	89.090,94	95.993,28
1a. Makanan, Minuman dan Rokok	15.761,24	18.402,48	20.445,74	22.859,72	24.820,39
1b. Pakaian dan Alas Kaki	2.481,40	2.612,79	2.891,38	3.139,95	3.407,46
1c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9.055,68	9.765,76	10.644,62	11.456,58	12.310,40
1d. Kesehatan dan Pendidikan	2.639,69	2.821,73	3.047,96	3.252,91	3.513,31
1e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	24.473,24	26.706,67	29.545,34	30.756,97	32.868,13
1f. Hotel dan Restoran	11.568,54	12.018,22	12.958,05	13.897,68	15.022,76
1g. Lainnya	2.978,14	3.145,45	3.520,05	3.727,13	4.050,82
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	205,38	230,24	222,50	235,05	254,62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.760,47	3.082,73	3.588,75	3.852,68	4.063,40
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	18.095,72	21.370,97	24.043,14	26.179,28	28.634,02
4a. Bangunan	15.821,06	18.313,73	20.639,54	22.369,92	24.599,61
4b. Non Bangunan	2.274,67	3.057,24	3.403,60	3.809,37	4.034,41
5. Perubahan Inventori					
2. Net Ekspor					
PDRB	57.715,00	64.109,36	70.765,23	76.908,85	83.327,64

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi  
2013 -2017**

*(Milliar Rupiah)*

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60.212,08	62.040,16	64.780,72	68.299,96	71.499,95
1a. Makanan, Minuman dan Rokok	12.603,24	13.344,80	13.986,41	14.619,06	15.349,18
1b. Pakaian dan Alas Kaki	2.251,39	2.322,65	2.479,49	2.613,14	2.738,19
1c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7.936,68	8.168,32	8.582,90	9.176,88	9.524,33
1d. Kesehatan dan Pendidikan	2.353,79	2.431,38	2.521,17	2.638,49	2.753,19
1e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	21.566,43	22.199,78	23.015,36	24.380,14	25.457,89
1f. Hotel dan Restoran	10.955,99	10.955,04	11.383,05	11.949,44	12.582,05
1g. Lainnya	2.544,57	2.618,19	2.812,35	2.922,81	3.095,11
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	179,23	192,06	176,48	181,95	190,48
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.166,93	2.256,11	2.366,34	2.448,19	2.525,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	15.320,29	16.914,64	18.047,03	19.223,78	20.511,33
4a. Bangunan	13.347,16	14.506,92	15.566,94	16.643,48	17.847,09
4b. Non Bangunan	1.973,13	2.407,71	2.480,09	2.580,30	2.664,23
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor					
PDRB	49.741,13	52.534,09	55.456,07	58.831,08	62.202,01

**Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto  
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,  
Kota Bekasi 2013 -2017**

*(Persen)*

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	119,48	117,73	117,36	115,84	115,20
1a. Makanan, Minuman dan Rokok	27,31	28,70	28,89	29,72	29,79
1b. Pakaian dan Alas Kaki	4,30	4,08	4,09	4,08	4,09
1c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	15,69	15,23	15,04	14,90	14,77
1d. Kesehatan dan Pendidikan	4,57	4,40	4,31	4,23	4,22
1e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	42,40	41,66	41,75	39,99	39,44
1f. Hotel dan Restoran	20,04	18,75	18,31	18,07	18,03
1g. Lainnya	5,16	4,91	4,97	4,85	4,86
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,36	0,36	0,31	0,31	0,31
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,78	4,81	5,07	5,01	4,88
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	31,35	33,34	33,98	34,04	34,36
4a. Bangunan	27,41	28,57	29,17	29,09	29,52
4b. Non Bangunan	3,94	4,77	4,81	4,95	4,84
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,  
Kota Bekasi 2013 -2017**

*(Persen)*

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,38	3,04	4,42	5,43	4,69
1a. Makanan, Minuman dan Rokok	2,63	5,88	4,81	4,52	4,99
1b. Pakaian dan Alas Kaki	8,97	3,17	6,75	5,39	4,79
1c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,61	2,92	5,08	6,92	3,79
1d. Kesehatan dan Pendidikan	6,26	3,30	3,69	4,65	4,35
1e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	3,54	2,94	3,67	5,93	4,42
1f. Hotel dan Restoran	2,56	-0,01	3,91	4,98	5,29
1g. Lainnya	1,45	2,89	7,42	3,93	5,89
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,59	7,16	-8,11	3,10	4,69
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,97	4,12	4,89	3,46	3,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	7,66	10,41	6,69	6,52	6,70
4a. Bangunan	17,49	8,69	7,31	6,92	7,23
4b. Non Bangunan	(31,25)	22,03	3,01	4,04	3,25
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor					
PDRB	6,04	5,61	5,56	6,09	5,73

**Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013 -2017**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	114,53	121,65	128,21	130,44	134,26
1a. Makanan, Minuman dan Rokok	125,06	137,90	146,18	156,37	161,71
1b. Pakaian dan Alas Kaki	110,22	112,49	116,61	120,16	124,44
1c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	114,10	119,56	124,02	124,84	129,25
1d. Kesehatan dan Pendidikan	112,15	116,05	120,89	123,29	127,61
1e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	113,48	120,30	128,37	126,16	129,11
1f. Hotel dan Restoran	105,59	109,70	113,84	116,30	119,40
1g. Lainnya	117,04	120,14	125,16	127,52	130,88
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	114,59	119,88	126,08	129,19	133,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	127,39	136,64	151,66	157,37	160,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	118,12	126,35	133,22	136,18	139,60
4a. Bangunan	118,53	126,24	132,59	134,41	137,84
4b. Non Bangunan	115,28	126,98	137,24	147,63	151,43
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor PDRB	116,03	122,03	127,61	130,73	133,96

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2013 -2017**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,69	6,22	5,39	1,74	2,93
1a. Makanan, Minuman dan Rokok	9,50	10,27	6,01	6,97	3,41
1b. Pakaian dan Alas Kaki	5,99	2,06	3,66	3,04	3,56
1c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,40	4,78	3,73	0,66	3,53
1d. Kesehatan dan Pendidikan	4,88	3,48	4,17	1,98	3,51
1e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	5,50	6,01	6,71	-1,73	2,34
1f. Hotel dan Restoran	1,01	3,90	3,77	2,17	2,66
1g. Lainnya	5,39	2,65	4,18	1,88	2,63
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,88	4,62	5,17	2,47	3,47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,43	7,26	10,99	3,76	2,22
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	8,16	6,97	5,44	2,22	2,51
4a. Bangunan	9,52	6,50	5,03	1,37	2,55
4b. Non Bangunan	1,98	10,14	8,08	7,57	2,57
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor PDRB	5,28	5,17	4,57	2,45	2,47



# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**

**— *Enlighten The Nation* —**